



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: PPH-09.OT.03.02 TAHUN 2023

**TENTANG
RENCANA KERJA DAN TARGET PRIORITAS PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TAHUN 2023**

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkelanjutan menuju Satuan Kerja Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani perlu disusun Rencana Prioritas dan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023;
 - b. bahwa kegiatan yang tercantum dalam lampiran keputusan ini telah selaras dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023 dan Road Map Reformasi Birokrasi Balitbang Hukum Dan HAM Tahun 2020-2024;
 - c. bahwa Rencana Kerja Dan Target Prioritas Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategis Nasional Pencegahan Korupsi Jangka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.OT.03.01 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PPH-388.OT.03 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PPH-05.OT.03.02 tahun 2023 tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM;
11. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengusulan dan evaluasi Pembangunan Zona Integritas Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG RENCANA KERJA DAN TARGET PRIORITAS PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja dan Target Prioritas Pembangunan Zona Integritas Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023 dibebankan kepada anggaran DIPA Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: SP DIPA-013.11.1.635549/2023 tanggal 30 November 2022.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2023

Pit. KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

IWAN KURNIAWAN
NIP 19640619 198811 1 001



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>

Lampiran
Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Rencana Prioritas dan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023

Nomor : PPH-09.OT.03.02 TAHUN 2023

Tanggal : 28 Februari 2023

RENCANA KERJA DAN TARGET PRIORITAS PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2023

A. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH- 19.OT.03.01 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024. Dalam rangka mempercepat pengimplementasian arahan presiden dan mempercepat pencapaian sasaran reformasi birokrasi yang terdapat pada road map reformasi birokrasi 2020-2024, terutama terkait birokrasi yang bersih dan akuntabel, dan pelayanan publik yang prima, perlu dibangun Zona Integritas (ZI) pada unit kerja/satuan kerja sebagai *pilot project* percontohan. Oleh karena itu, pelaksanaan ZI yang merupakan miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi pada unit kerja/satuan kerja, diutamakan pada unit kerja/satuan kerja yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Diharapkan unit yang membangun Zona Integritas dan mendapat predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dapat menjadi percontohan bagi unit kerja/satuan kerja lain tentang menerapkan tata kelola yang baik serta memberikan pelayanan publik yang prima dan berintegritas.

Pencapaian pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) meliputi 6 (enam) area perubahan yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Selain area tersebut juga telah terbentuk Kelompok Kerja Manajemen Media sebagai area pendukung yang mempunyai tugas antara lain mendokumentasikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WilayahBebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal lain yaitu ditunjang pula dari komponen hasil survei persepsi anti korupsi dan survei persepsi kualitas pelayanan.

Pada bulan Desember 2021, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia mendapatkan penghargaan sebagai satuan kerja berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Berdasarkan Peraturan Presiden No 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan HAM, bahwa Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia telah berubah nomenklatur menjadi Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Adanya perubahan nomenklatur tersebut diharapkan agar terus berkomitmen dan berkelanjutan dalam

meningkatkan kinerja dan menjadi percontohan bagi satuan kerja lainnya dalam membangun Pembangunan Zona Integritas satuan kerja Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Dokumen rencana kerja ini dimaksudkan sebagai acuan dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2023;
2. Tujuan penyusunan dokumen rencana kerja ini adalah memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas dan memberikan dampak positif pada 6 (enam) area perubahan, yaitu: Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Manajemen Media.

C. PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

1. Pelaksanaan Kegiatan

Berdasarkan nota dinas Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor. PPH.1-OT.03.02-01 tanggal 16 Januari 2023 hal undangan "Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Tahun 2023 yang dirangkaikan dengan kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai Tahun 2023" bahwa kegiatan pencanangan pembangunan zona integritas di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia telah dilaksanakan pada:

hari/tanggal : Selasa, 17 Januari 2022

waktu : 08.30 WIB s.d. selesai

tempat : Aula Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Lantai 8

2. Peserta

Peserta kegiatan pencanangan zona integritas tahun 2023 adalah Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama dan seluruh pegawai di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

3. Hasil yang dicapai

Pencanangan pembangunan zona integritas merupakan upaya untuk mengakselerasi tercapainya tujuan-tujuan dari reformasi birokrasi, yakni peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, instansi yang bersih dan bebas dari KKN, serta peningkatan Pelayanan Publik. Untuk dapat ditetapkan sebagai satker berpredikat WBK/WBBM, seluruh Satuan kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM wajib melaksanakan pembangunan zona integritas dengan baik, dan adapun tahapan yang pertama adalah pencanangan zona integritas. Pencanangan pembangunan zona integritas adalah deklarasi/pernyataan dari Plt. Kepala Badan bahwa Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM telah siap membangun dan melaksanakan zona integritas. Kegiatan pencanangan merupakan langkah awal pembangunan zona integritas. Pencanangan dilakukan dengan menandatangani dokumen pencanangan oleh Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM yang dilanjutkan dengan penandatanganan pakta integritas serta komitmen bersama antara Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM dengan Para Pimpinan Tinggi Pratama, beserta jajaran di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM.

D. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAM TAHUN 2023

Area: Manajemen Perubahan

No.	Rencana Kerja	Tujuan	Indikator	Target	Data Dukung
1	Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas	Sebagai upaya peningkatan kematangan implementasi perubahan, keberlanjutan perubahan dan Peningkatan kualitas pelayanan dan Peningkatan Kinerja.	SK Tim Kerja telah ditetapkan melalui pelaksanaan survei secara online pemilihan tim kerja pembangunan ZI oleh seluruh pegawai	B03	Dokumentasi dan laporan pelaksanaan kegiatan, SK Tim Kerja
2	Penandatanganan Deklarasi Pembangunan Zona Integritas	Meningkatkan komitmen seluruh pegawai Balitbang Hukum dan HAM berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Meningkatnya integritas seluruh pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi melalui proses Pembangunan Zona Integritas	B03	Dokumentasi dan laporan pelaksanaan kegiatan serta piagam pencaanangan dan pakta integritas
3	Monitoring dan Evaluasi serta tindak Lanjut Pembangunan Zona Integritas	Peningkatan capaian Pembangunan Zona Integritas memperkuat keberlanjutan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani	Keberlanjutan dan peningkatan kualitas pelaksanaan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani	B03, B06, B09, B12	Undangan Rapat, Notula Rapat, daftar Hadir, dan Dokumentasi
4	Dokumen Rencana Aksi dan rencana Prioritas Pembangunan Zona Integritas	Peningkatan dan Percepatan Rencana aksi dan Rencana prioritas agar tepat sasaran sesuai dengan tujuan organisasi dan penciptaan inovasi pelayanan publik terbaik	Panduan dan arah kebijakan untuk peningkatan kapasitas dan kualitas organisasi	B03	Laporan dan Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan
5	Pemilihan pegawai teladan dengan Teknologi Informasi	Mengapresiasi dan memotivasi pegawai untuk memberikan kinerja yang lebih baik.	Terpilihnya pegawai teladan	B03, B06, B09, B12	Laporan Pemilihan pegawai teladan dengan Teknologi Informasi (Undangan Rapat, Notula, Daftar Hadir, dan Dokumentasi)
6	Pelaksanaan survei Integritas Organisasi	Meningkatkan dan mengevaluasi tindak lanjut terhadap perolehan hasil survei IKM/IPK dan survei integritas	Hasil survei integritas	Seluruh Pegawai (perbulan)	Laporan pelaksanaan kegiatan

Area: PENATAAN TATA LAKSANA

No.	Rencana Kerja	Tujuan	Indikator	Target	Data Dukung
1	Evaluasi Standar Operasi Prosedur	Meningkatnya proses penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi sehingga dapat berjalan dengan efisiensi dan efektif	Tersusunnya standar operasional prosedur (SOP) kegiatan utama	B06, B12	Laporan (Sesuai Tata Naskah Dinas) dilengkapi dengan (Undangan Rapat, Notula, Daftar Hadir, dan Dokumentasi)
2	Evaluasi Proses Bisnis Level II	Menciptakan Strategi Pengembangan proses bisnis instansi dan unit guna peningkatan kualitas layanan publik	Tersusunnya proses bisnis instansi dan unit yang terarah dalam rangka guna peningkatan kualitas layanan publik	B12	Laporan evaluasi proses bisnis
3	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPBE	Sebagai upaya peningkatan kematangan implementasi tata kelola pemerintahan SPBE yang profesional	Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan publik	B06, B12	Dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPBE
4	Monitoring dan evaluasi implementasi keterbukaan informasi publik	Melakukan penguatan implementasi keterbukaan informasi publik	Meningkatnya Penyebaran Informasi layanan publik dan partisipasi masyarakat dalam memberikan umpan balik atas kinerja Balitbangkumham	B03, B06, B09, B12	Laporan dan rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik

Area: PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

No.	Rencana Kerja	Tujuan	Indikator	Target	Data Dukung
1	Analisis Kebutuhan Pegawai	Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing instansi pemerintah	Jumlah kebutuhan Pegawai berdasarkan Pendidikan, kualifikasi kompetensi serta usia dan jenis kelamin	B12	Dokumen Usulan Kebutuhan Pegawai
2	Usulan mutasi, promosi, dan kenaikan jenjang berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar	Menerapkan prinsip-prinsip manajemen ASN secara professional	Pelaksanaan pengelolaan pegawai sesuai dengan aturan yang berlaku	B12	Dokumen usulan
3	Pengukuran kinerja individu secara berkala setiap bulan	Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM	Pelaksanaan pengelolaan pegawai sesuai dengan aturan yang berlaku	B03, B06, B09, B12	Dokumen pengukuran kinerja individu terhadap 10 orang pegawai dan pejabat per bulan yang diperoleh dari SIMPEG.
4	Internalisasi dan publikasi kode Etik Pegawai	Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM	Tingkat Pemahaman Kode Etik Pegawai dengan Sosialisasi Dampak Jangka pendek Internalisasi dan publikasi kode etik pegawai, melalui Evaluasi pengawasan internal dan agen perubahan	B06, B12	Laporan (Sesuai Tata Naskah Dinas) dilengkapi dengan (Undangan Rapat, Notula, Daftar Hadir, dan Dokumentasi

Area: PENGUATAN AKUNTABILITAS

No.	Rencana Kerja	Tujuan	Indikator	Target	Data Dukung
1	Keterlibatan Pimpinan secara langsung pada proses perencanaan program, kegiatan, dan anggaran	Mewujudkan keterlibatan pimpinan dalam rangka meningkatkan kualitas rencana kinerja	Peningkatan integritas individu dan organisasi	B03	Laporan triwulan keterlibatan pimpinan pada penyusunan, penyesuaian, dan penetapan: <ul style="list-style-type: none"> • Indikator Kinerja Utama (IKU) yang SMART • Cascading • Pohon Kinerja • Perjanjian Kinerja yang terintegrasi antara Eselon I, II, III, IV dan JF • Target Kinerja (Tarja)
2	Keterlibatan Pimpinan secara langsung pada Monitoring dan evaluasi Perjanjian Kinerja, dan Target Kinerja	Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggung jawab dalam monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja secara berkala	Tercapainya capaian kinerja sesuai dengan target kinerja: SMART DJA (perbulan), e-Monev Bappenas (triwulan), e-Performance (triwulan), TARJA (triwulan)	B03, B06, B09, B12	Laporan hasil evaluasi (Sesuai Tata Naskah Dinas)
3	Pelatihan untuk meningkatkan kapasitas SDM yang menangani perencanaan dan anggaran, serta akuntabilitas kinerja.	Peningkatan kapasitas SDM dalam menangani perencanaan dan anggaran, serta akuntabilitas kinerja	Tersedianya SDM yang kompeten dalam menangani perencanaan dan anggaran, serta akuntabilitas kinerja	Orang/tahun	Sertifikat e-learning/workshop/diklat/
4	Pemberian penghargaan dan sanksi atas kinerja pengelolaan kegiatan dan anggaran di tingkat pusat dan kantor wilayah	Penguatan transparansi, efektivitas, dan efisiensi atas pengelolaan kegiatan dan anggaran dalam rangka implementasi anggaran berbasis kinerja	Hasil capaian kinerja atas pengelolaan kegiatan dan anggaran menjadi dasar sebagai pemberian penghargaan dan sanksi	B12	<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman/Juklak/Juknis Pemberian Penghargaan dan Sanksi atas Kinerja Pengelolaan Kegiatan dan Anggaran • SK Penetapan Pemberian Penghargaan dan Sanksi atas Kinerja Pengelolaan Kegiatan • Dokumen RKA-K/L tahun sebelumnya dan tahun berjalan unit kerja Eselon II

Area: PENGUATAN PENGAWASAN

No.	Rencana Kerja	Tujuan	Indikator	Target	Data Dukung
1	Pembentukan Tim Satgas tentang penyelenggaraan SPIP	Penyelenggaraan SPIP secara efektif, efisien, terukur dan akuntabel	Pengendalian intern yang berkelanjutan dan terintegrasi	B03	SK Penyelenggaraan SPIP (Undangan Rapat, Notula, Daftar Hadir, dan Dokumentasi)
2	Monitoring, dan evaluasi Pelaksanaan SPIP secara berkala (rekomendasi Itjen Tahun 2022)	Penyelenggaraan SPIP secara efektif, efisien, terukur dan akuntabel	Pengendalian intern yang berkelanjutan dan terintegrasi	B03, B06, B09, B12	Laporan dan rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi (undangan rapat, notula, daftar hadir dan dokumentasi)
3	Tindak lanjut rekomendasi SPIP (Berita Acara) dari Inspektorat Jenderal Tahun 2022	Penyelenggaraan SPIP secara efektif, efisien, terukur dan akuntabel	Pengendalian intern yang berkelanjutan dan terintegrasi	B03	Laporan rencana aksi hasil rekomendasi Itjen (undangan rapat, notula, daftar hadir dan dokumentasi)
4	Monitoring dan evaluasi pengaduan E-LAPOR yang ditindaklanjuti secara terpadu dan tuntas	Terwujudnya mekanisme penyampaian informasi penting dan kritis dari pihak pelapor kepada pihak yang menangani dengan aman serta mendapatkan perlindungan.	Tercapainya tindak lanjut pengaduan yang cepat dan tepat sasaran.	B03, B06, B09, B12	Laporan hasil monitoring dan evaluasi pengaduan yang masuk ke E-LAPOR dan telah diselesaikan secara tuntas
5	Pembentukan Tim tentang benturan kepentingan	Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Implementasi Penanganan dan Pencegahan Benturan Kepentingan	B03	SK Tim Benturan Kepentingan (Undangan Rapat, Notula, Daftar Hadir, dan Dokumentasi)
6	Sosialisasi Benturan Kepentingan	Menciptakan Budaya Pelayanan Publik yang dapat mengenal, mencegah dan mengatasi situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien	Terciptanya Pemahaman Pegawai terhadap Budaya Pelayanan Publik yang dapat mengenal, mencegah dan mengatasi situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien	B06	Laporan sosialisasi Benturan Kepentingan (Undangan Rapat, Notula, Daftar Hadir, dan Dokumentasi)
7	Evaluasi dan tindak lanjut benturan kepentingan	Mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik	Untuk mengetahui apakah penanganan benturan kepentingan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien	B03, B06, B09, B12	Laporan dan rekomendasi hasil evaluasi Benturan Kepentingan (undangan rapat, notula, daftar hadir dan dokumentasi)
8	<i>Whistle Blowing System</i>	Terwujudnya mekanisme penyampaian informasi penting dan kritis dari	Tidak adanya pengaduan (<i>zero</i> pengaduan)	B.03 B.06 B.09 B.12	Laporan Evaluasi dan tindak Lanjut penangan pengaduan melalui <i>Whistleblowing System</i> (<i>perbulan</i>)

Area: Penguatan Pengawasan

No.	Rencana Kerja	Tujuan	Indikator	Target	Data Dukung
		pihak pelapor kepada pihak yang menangani dengan aman serta mendapatkan perlindungan.			(Undangan Rapat, Notula, Dokumentasi, Presensi/Daftar Hadir),

Area: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK					
No.	Rencana Kerja	Tujuan	Indikator	Target	Data Dukung
1	Sosialisasi/publikasi 6 komponen service delivery dalam dokumen standar pelayanan	Meningkatnya implementasi kebijakan bidang pelayanan publik	Telah dilakukan sosialisasi/publikasi standar pelayanan	B06	Dokumen Kegiatan sosialisasi, capture atau foto publikasi
2	Publikasi maklumat pelayanan	Meningkatnya implementasi kebijakan bidang pelayanan publik;	Telah dilakukan publikasi maklumat pelayanan	B06	Capture atau foto publikasi
3	Publikasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat	1) Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Persepsi Korupsi; 2) Rekomendasi evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan publik secara berkala.	Telah dilakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala serta evaluasi hasil survei	B03, B06, B09, B12	Capture atau foto publikasi
4	Pengelolaan pengaduan pelayanan publik	Pengaduan pelayanan publik secara terpadu, tuntas dan berkelanjutan	Telah dilakukan pengelolaan penanganan pengaduan pelayanan publik	B06, B12	Laporan pengelolaan pengaduan pelayanan publik (lampiran berupa capture aplikasi atau media sosial)
5	Pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan terjangkau	Meningkatnya metode pelayanan publik untuk memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung	Pelayanan publik telah dikelola secara elektronik	B06, B12	Rekapitulasi pelayanan berbasis IT dan Capture seluruh layanan online
6	Implementasi program layan unggulan (quick wins dalam road map RB Kemenkumham	Meningkatkan pemanfaatan hasil analisis kebijakan	Terdapat tindak lanjut pemanfaatan hasil analisis kebijakan	B12	Laporan (Sesuai Tata Naskah Dinas)

SUPPORTING: MANAJEMEN MEDIA			
No.	Rencana Aksi	Waktu	Output
1.	Mendokumentasikan setiap rapat kerja pembangunan zona integritas	Januari 2023 - selesai	Dokumen foto
2.	Melakukan peliputan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan zona integritas	Januari - Desember 2023	Berita
3.	Pengelolaan layanan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID)	Januari - Desember 2023	Laporan
4.	Publikasi pemberitaan pelaksanaan kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM pada website dan media sosial	Januari - Desember 2023	<i>Release</i> Berita
5.	Membuat video singkat tentang pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan zona integritas dan kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM	Juni 2023	Kegiatan, Infografis, Berita
6.	Promosi Konten Media Sosial	Tentative setiap bulannya	Konten media

E. TARGET PRIORITAS PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAM TAHUN 2023

No.	Rencana Kerja	Tujuan	Indikator	Target	Data Dukung
1	Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas	Sebagai upaya peningkatan kematangan implementasi perubahan, keberlanjutan perubahan dan Peningkatan kualitas pelayanan dan Peningkatan Kinerja.	SK Tim Kerja telah ditetapkan melalui pelaksanaan survei secara online pemilihan tim kerja pembangunan ZI oleh seluruh pegawai	B03	Dokumentasi dan laporan pelaksanaan kegiatan, SK Tim Kerja
2	Penandatanganan Deklarasi Pembangunan Zona Integritas	Meningkatkan komitmen seluruh pegawai Balitbang Hukum dan HAM berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Meningkatnya integritas seluruh pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi melalui proses Pembangunan Zona Integritas	(B03) Seluruh Pegawai	Dokumentasi dan laporan pelaksanaan kegiatan serta piagam pencanangan dan pakta integritas
3	Internalisasi Tata Nilai PASTI dan BerAkhlik (contoh: apel pagi dan sore/ coffee morning/ rapat internal/ workshop/dll)	Sebagai upaya peningkatan nilai komitmen dan implementasi perubahan (reform) yang tepat sasaran sesuai dengan tujuan organisasi dan penciptaan inovasi pelayanan publik terbaik	Meningkatnya budaya kerja yang adaptif.	B03, B06, B09, B12	Laporan Kegiatan internalisasi
4	Pemilihan pegawai teladan dengan Teknologi Informasi	Mengapresiasi dan memotivasi pegawai untuk memberikan kinerja yang lebih baik	Terpilihnya pegawai teladan	B03, B06, B09, B12	Laporan Pemilihan pegawai teladan dengan Teknologi Informasi (Undangan Rapat, Notula, Daftar Hadir, dan Dokumentasi)
5	Pelaksanaan survei Integritas Organisasi	Meningkatkan dan mengevaluasi tindak lanjut terhadap perolehan hasil survei IKM/IPK dan survei integritas	Hasil survei integritas	Seluruh Pegawai (perbulan)	Laporan pelaksanaan kegiatan
6	Evaluasi Standar Operasi Prosedur	Meningkatnya proses penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi sehingga dapat berjalan dengan efisiensi dan efektif	Tersusunnya standar operasional prosedur (SOP) kegiatan utama	B06, B12	Laporan (Sesuai Tata Naskah Dinas) dilengkapi dengan (Undangan Rapat, Notula, Daftar Hadir, dan Dokumentasi)
7	Evaluasi Proses Bisnis Level II	Menciptakan Strategi Pengembangan proses bisnis instansi dan unit guna peningkatan kualitas layanan publik	Tersusunnya proses bisnis instansi dan unit yang terarah dalam rangka guna peningkatan kualitas layanan publik	B12	Laporan evaluasi proses bisnis

No.	Rencana Kerja	Tujuan	Indikator	Target	Data Dukung
8	Melakukan <i>public campaign</i> penegakan disiplin untuk internal pegawai masing-masing satker	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM	Penegakan disiplin pegawai pada pelaksanaan tugas dan fungsi yang Akuntabel dan Transparan	B06	Capture bukti kegiatan <i>Public Campaign</i> berupa pemasangan atau penyebarluasan flyer/baliho/banner/poster
9	<i>Coaching and mentoring</i> terkait capaian kinerja secara berkala pada unit sekretariat/unit eselon II/bagian	Meningkatkan pemahaman pegawai terkait tuisi dan meningkatkan kinerja pegawai melalui perubahan <i>mindset</i>	Peningkatan integritas individu dan organisasi	B03, B06, B09, B12	Dokumentasi dan Laporan (Sesuai Tata Naskah Dinas)
10	<i>Coaching and Mentoring</i> secara berkala pada setiap bagian dengan agenda: a. evaluasi pelaksanaan kegiatan 1 bulan b. perencanaan pelaksanaan kegiatan 1 bulan c. penguatan integritas organisasi	Meningkatkan pemahaman pegawai terkait tuisi dan meningkatkan kinerja pegawai melalui perubahan <i>mindset</i>	Peningkatan integritas individu dan organisasi	B03, B06, B09, B12	Dokumentasi dan Laporan (Sesuai Tata Naskah Dinas)
11	Tindak lanjut rekomendasi SPIP (Berita Acara) dari Inspektorat Jenderal Tahun 2022	Penyelenggaraan SPIP secara efektif, efisien, terukur dan akuntabel	Pengendalian intern yang berkelanjutan dan terintegrasi	B03	Laporan rencana aksi hasil rekomendasi Itjen (undangan rapat, notula, daftar hadir dan dokumentasi)
12	Pelaksanaan tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi reuiu tim pemeriksa internal (pemeriksaan keuangan)	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> Rekomendasi hasil reuiu tim pemeriksa internal yang telah ditindaklanjuti; Tidak adanya temuan atas pemeriksaan tim pemeriksa internal pada tahun berjalan (<i>zero</i> temuan). 	B09	Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi (undangan rapat, notula, daftar hadir dan dokumentasi)
13	Pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel	Tercapainya kinerja realisasi anggaran organisasi	B12	Laporan

No.	Rencana Kerja	Tujuan	Indikator	Target	Data Dukung
14	Sosialisasi/ publikasi 6 komponen service delivery dalam dokumen standar pelayanan	Meningkatnya implementasi kebijakan bidang pelayanan publik	Telah dilakukan sosialisasi/ publikasi standar pelayanan	B06	Dokumen Kegiatan sosialisasi, capture atau foto publikasi
15	Publikasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat	1. Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Persepsi Korupsi; 2. Rekomendasi evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan publik secara berkala.	Telah dilakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala serta evaluasi hasil survei	B03, B06, B09, B12	Capture atau foto publikasi

Plt. KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

IWAN KURNIAWAN
NIP 19640619 198811 1 001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>